

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, pembangunana di bidang perekonomiannya didukung oleh tiga sektor perekonomian yaitu sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dan koperasi. BUMN sebagai badan usaha yang dikelola oleh pemerintah memiliki peran penting dalam memecahkan persoalan ekonomi terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN yang mempunyai tujuan ganda yaitu sebagai agen pembangunan Nasional dan sebagai organisasi yang mencari keuntungan, sehubungan dengan misi ganda tersebut, maka tolak ukur kesuksesan BUMN dapat dilihat dari seberapa besar peranannya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunana nasional.

Menyimak perkembangan sejumlah BUMN di Indonesia saat ini, para ahli menyimpulkan adanya sikap yang pesimistis terhadap proyek BUMN dimasa yang aka datang. Adanya sikap itu sendiri berpijak pada kinerja BUMN yang tidak memuaskan dan masih rumitnya birokrasi yang menyebabkan profesionalisme usaha menjadi rendah. Kekhawatiran ini semakin bertambah jika dikaitkan dengan kesiapan BUMN untuk masuk ke dalam persaingan global di era perdagangan bebas.

Untuk mengantisipasi peluang dan ancaman tersebut, BUMN harus mempersiapkan diri dengan menciptakan produk barang atau jasa yang sesuai dengan selera konsumen, memiliki kualitas yang baik, dengan harga yang

kompetitif. Dengan bermodalkan kemampuan pada aspek keuangan saja, yang meliputi R-L-S (Rentabilitas-Liabilitas-Solvabilitas), belum cukup memberikan jaminan bahwa BUMN akan mampu bertahan hidup dan bersaing di pasar global. BUMN harus mampu menjaring dan melayani konsumen dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. BUMN harus mampu memanfaatkan teknologi yang tepat untuk menciptakan produk yang berkualitas baik. Dengan teknologi tersebut, BUMN harus mampu menciptakan proses bisnis internal yang efisien agar dapat menghasilkan produk dengan harga yang bersaing. Dan yang tidak kalah pentingnya, para karyawan BUMN harus memiliki motivasi yang kuat untuk selalu mengupgrade diri dan meningkatkan kemampuan mereka, sehingga dapat sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan.

Tujuan semua perusahaan baik itu BUMN maupun perusahaan swasta pada umumnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yang pencapaiannya sering kita sebut dengan kinerja.

Kinerja perusahaan yang tidak memuaskan dapat terjadi karena kurang tepatnya penilaian kinerja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga akan mengaburkan kemampuan perusahaan dalam peningkatan kinerja usahanya.

Kinerja keuangan dapat dikatakan sehat jika perusahaan dapat menjalankan proses bisnis dan manajemen yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan customer yang puas dan berdampak terhadap kenaikan pendapatan dan akan menghasilkan karyawan yang produktif dan memiliki komitmen tinggi untuk menghasilkan value bagi customer, sehingga diharapkan berdampak pada penurunan biaya dalam jangka panjang.

Keunggulan kinerja keuangan perusahaan dapat terlihat dari adanya pertumbuhan tingkat ROI yang merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan investasi yang ditanamkan untuk memperoleh laba tersebut. Sehingga dapat terlihat seberapa efisien perusahaan menanamkan dananya dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan.

PT. POS Indonesia (Persero) sebagai salah satu bagian usaha dari BUMN non infrastruktur yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang tidak terlepas dari permasalahan yang ada yaitu rendahnya kinerja perusahaan, rendahnya kegiatan investasi peralatan perusahaan, rendahnya penemuan produk-produk baru, dan rendahnya laba yang diperoleh. Rendahnya laba yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

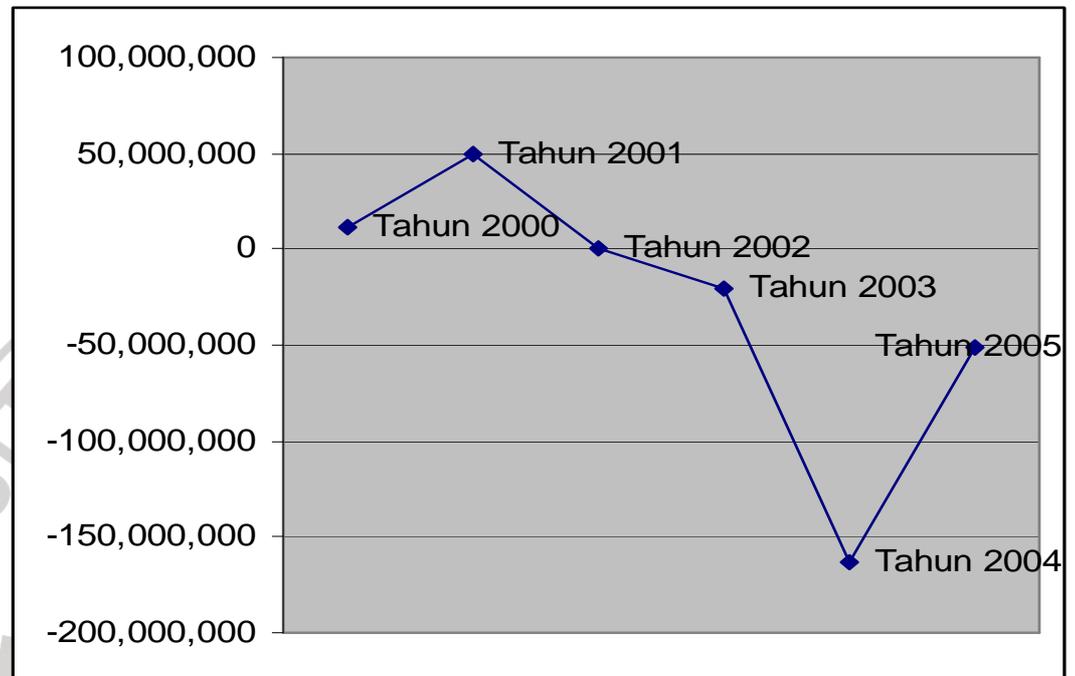
Tabel 1.1

Laba(Rugi) PT.POS Indonesia (Persero)

Tahun	Laba(Rugi) bersih (dalam rupiah)
2000	11.189.879.014
2001	50.044.014.446
2002	41.831
2003	(20.382.693.810)
2004	(162.613.224.904)
2005	(51.409.394.495)

Sumber : Data PT.POS Indonesia(Persero), diolah kembali

Dalam bentuk grafik digambarkan perubahan laba (rugi) bersih yang didapat oleh perusahaan sebagai berikut :



Sumber : Data PT.POS Indonesia (Persero) diolah kembali

Gambar 1.1

Laba (Rugi) Tahun 2000-2005

Dari tabel diatas diperoleh bahwa laba (rugi) bersih PT.POS Indonesia (Persero) selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2000 laba naik dari Rp.11.189.879.014 menjadi Rp. 50.044.014.446 di tahun 2001. Namun pada tahun 2002 laba mengalami penurunan Rp.41.831. Sebaliknya untuk tahun 2003 PT.POS Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar yaitu Rp. 20.382.693.810. Pada tahun 2004 PT.POS Indonesia tetap saja mengalami kerugian yang sangat besar yaitu Rp. 162.613.224.904. Pada tahun 2005 PT.Pos Indonesia masih mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 50.044.014.446.

Berdasarkan hasil penelitian sementara di bagian akuntansi dan anggaran, diduga manajemen PT.POS Indonesia lebih terfokus pada masalah R-L-S (rentabilitas, liabilitas, solvabilitas). Kalau hal ini dibiarkan, lambat laun akan menyebabkan PT.POS Indonesia (Persero) tidak dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dibidang layanan komunikasi, keuangan dan logistik. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kembali tentang penilaian kinerja yang telah dilakukan.

Salah satu upaya agar dapat terus berkembang, perusahaan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan usaha. salah satu upaya adalah dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang dapat menghasilkan *feed back* bagi pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien.

Tentunya sebagai pemilik modal, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia perlu untuk mengetahui hasil yang diharapkan. Salah satu cara untuk mengetahui cara keberhasilan perusahaan adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Dikarenakan perkembangan usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka maka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kinerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing. Untuk mengetahui kinerja manajemen perusahaan perlu adanya suatu penilaian. Penilaian kinerja ini berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen perusahaan dalam proses pengambilan keputusan, juga memperlihatkan kepada investor maupun pelanggan/masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 agar system penilaian kinerja perusahaan dapat terkontrol dengan baik. Sehingga PT.POS Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN yang termasuk BUMN non Infrastruktur, wajib untuk mengadakan tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai yang dianjurkan oleh Surat Keputusan tersebut.

Dalam surat keputusan tersebut terdapat beberapa aspek-aspek yang diukur yang masing-masing mempunyai bobot untuk tiap aspek nya berdasarkan kriteri jenis BUMN. Aspek-aspek yang diukur tersebut terdiri dari : aspek keuangan, aspek operasional, serta aspek administrasi.

Untuk memperoleh penilaian kinerja yang baik, maka diperlukan prinsip penilaian yang tepat sehingga dapat dihindari hasil yang dapat mengaburkan dan menyembunyikan kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu nilai yang ekonomis dimasa yang akan datang. Salah satu prinsip penilaian kinerja yang tepat untuk menilai kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan prinsip *good corporate governance* (GCG). Meskipun terdapat aturan pemerintah tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, PT.POS Indonesia (Persero) mulai menerapkan prinsip GCG beserta umpan baliknya karena pemikiran GCG dapat mengukur kinerja perusahaan dari lima prinsip , yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kewajaran (fairness), kemandirian (independency). Perpaduan kelima dimensi ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan prinsip yang hanya mementingkan aspek keuangan saja.

Penilaian kinerja manajemen mengalami perluasan pada aspek keuangan dan non keuangan. Namun, penilaian terhadap aspek keuangan masih sangat perlu untuk dilakukan karena penilaian kinerja dilihat dari aspek keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran apakah strategi, sasaran strategi, inisiatif strategi, dan implementasi, mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba/rugi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertahan hidup, berhasil, dan sejahtera. Hasil pengukuran kinerja ini dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dan juga sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan.

Menurut penuturan di atas, maka setiap BUMN harus dapat mengontrol kinerja keuangannya agar dapat memenuhi setoran dividen kepada Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan prinsip GCG yang telah diterapkan di tingkat Internasional. Namun, walau menyadari pentingnya praktik GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan-perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada bila dibandingkan dengan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis bermaksud meneliti masalah pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap informasi kinerja keuangan pada PT. POS Indonesia (Persero).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dirasakan sangat berpengaruh terhadap informasi kinerja keuangan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan termasuk didalamnya adalah laporan keuangan (PT.POS) Indonesia, maka tersusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip GCG Perusahaan (PT.POS) Indonesia.
2. Bagaimanakah informasi kinerja keuangan perusahaan (PT.POS) Indonesia.
3. Bagaimanakah pengaruh penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan perusahaan (PT.POS) Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang akan penulis gunakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana akuntansi pada Universitas Pendidikan Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini yang berdasarkan pada rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip GCG Pada PT.POS Indonesia.
2. Untuk mengetahui informasi kinerja keuangan PT.POS Indonesia.
3. Untuk mengetahui ROI pada PT. POS Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap informasi kinerja keuangan PT. POS Indonesia.

1.3 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai bahan masukan bagi perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun pasar modal, serta memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip GCG sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan terutama yang menyangkut keuangan. Secara khusus penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang GCG yang selama ini penulis peroleh dari artikel-artikel dan membandingkan dengan kenyataan yang ada pada dunia usaha khususnya di Indonesia serta untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di Indonesia.
2. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan untuk dapat lebih memahami arti dari GCG dan mampu menerapkannya.

3. Bagi perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan milik Negara diharapkan lebih dapat membudayakan GCG, karena manfaat positif dari GCG akan menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih sehat.
4. Secara teoritis dapat dijadikan sumbangan keilmuan dibidang studi akuntansi.

1.4 Kerangka Pemikiran, Asumsi, dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka pemikiran

Dengan telah dipahaminya penerapan prinsip *good governance* pada sektor publik, maka untuk mengkaitkannya dengan penerapan *good governance* di sektor swasta berikut ini perlu dipahami tentang *good corporate governance*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP- 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ditetapkan bahwa: *Corporate Governance* adalah suatu proses dan yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance (GCG) dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang dapat memberikan jaminan untuk berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, bertanggungjawab, kemandirian dan

akuntabilitas. Dalam usulan penelitian ini, penerapan prinsip GCG lebih ditekankan pada Badan Usaha Milik Negara, karena dianggap kurang memperhatikan dalam hal penerapan GCG tersebut. Sedangkan definisi dari Komite Nasional GCG Indonesia,

GCG merupakan pola hubungan, sistem serta yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders lainnya. Pola hubungan, sistem, serta prose situ sendiri, berjalan berdasarkan empat prinsip, yakni : transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan tanggungjawab.

Sedangkan menurut Indra Surya (2006:24) *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai tata cara pengelolaan perusahaan yang baik sebagaimana mestinya.

Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Ikatan Akuntan Indonesia (1996:5) memberi penjelasan tentang kinerja,

Yaitu informasi kinerja perusahaan terutama apabila dilihat dari probabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya yang ada. Disamping itu, informasi kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumberdaya

Hubungan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan *kinerja keuangan* sangat erat sekali karena GCG bukan semata-mata hanya slogan belaka tetapi merupakan sesuatu yang menjiwai kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan perusahaan, yang harus benar-benar diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Tidak cukup dengan menyatakan bahwa perusahaan memiliki pedoman GCG dan memiliki

komisaris independent, atau membentuk komite audit, sebab penerapan GCG tidak hanya ditandai dengan adanya struktur, segala sesuatunya harus dimulai dari atas. Agar GCG tersebut dapat terwujud maka direksi dan manajemen puncak, harus memiliki komitmen penuh dalam implementasi GCG tersebut. Mereka harus benar-benar menjadikan GCG sebagai budaya yang hidup dan berlaku di perusahaan, pimpinan puncak dituntut selalu mengambil keputusan berdasarkan atas asas kepatuhan. Peraturan dan etika bisnis harus menjadi acuan dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat mengambil inisiatif dengan mengharuskan direksi, dewan komisaris dan setiap personil yang memiliki kewenangan untuk membuat pernyataan secara periodik yang menyatakan dalam aktivitas pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan, aktivitas bersandar pada etika bisnis yang baik serta tidak ada penyimpangan yang dilakukan. Manajemen puncak perlu mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan akan pentingnya GCG, dan manfaat yang diperoleh dengan penerapan GCG tersebut. Dengan demikian, seluruh jajaran dalam perusahaan dapat membaca secara jelas pesan yang disampaikan oleh pimpinan mereka bahwa perusahaan serius dalam menerapkan GCG.

Good Corporate Governance (GCG) juga merupakan tujuan, tetapi juga merupakan sebuah proses yang harus dilalui untuk tujuan kesinambungan usaha jangka panjang. Salah satu bentuk cerminan perilaku yang harus diterapkan adalah penerapan etika bisnis secara konsisten. Etika bisnis ini perlu diterapkan dalam setiap aktivitas perusahaan, baik itu dalam

berinteraksi antara sesama pengurus perusahaan, dengan pemegang saham, komisaris independent, sekretaris perusahaan, satuan pengawas intern, regulasi, rekanan (baik itu supplier maupun costumer) dan juga dengan masyarakat.

Adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah sebagai berikut:

- **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai perusahaan.

- **Kemandirian (*Independency*)**

Keadaan yang menggambarkan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

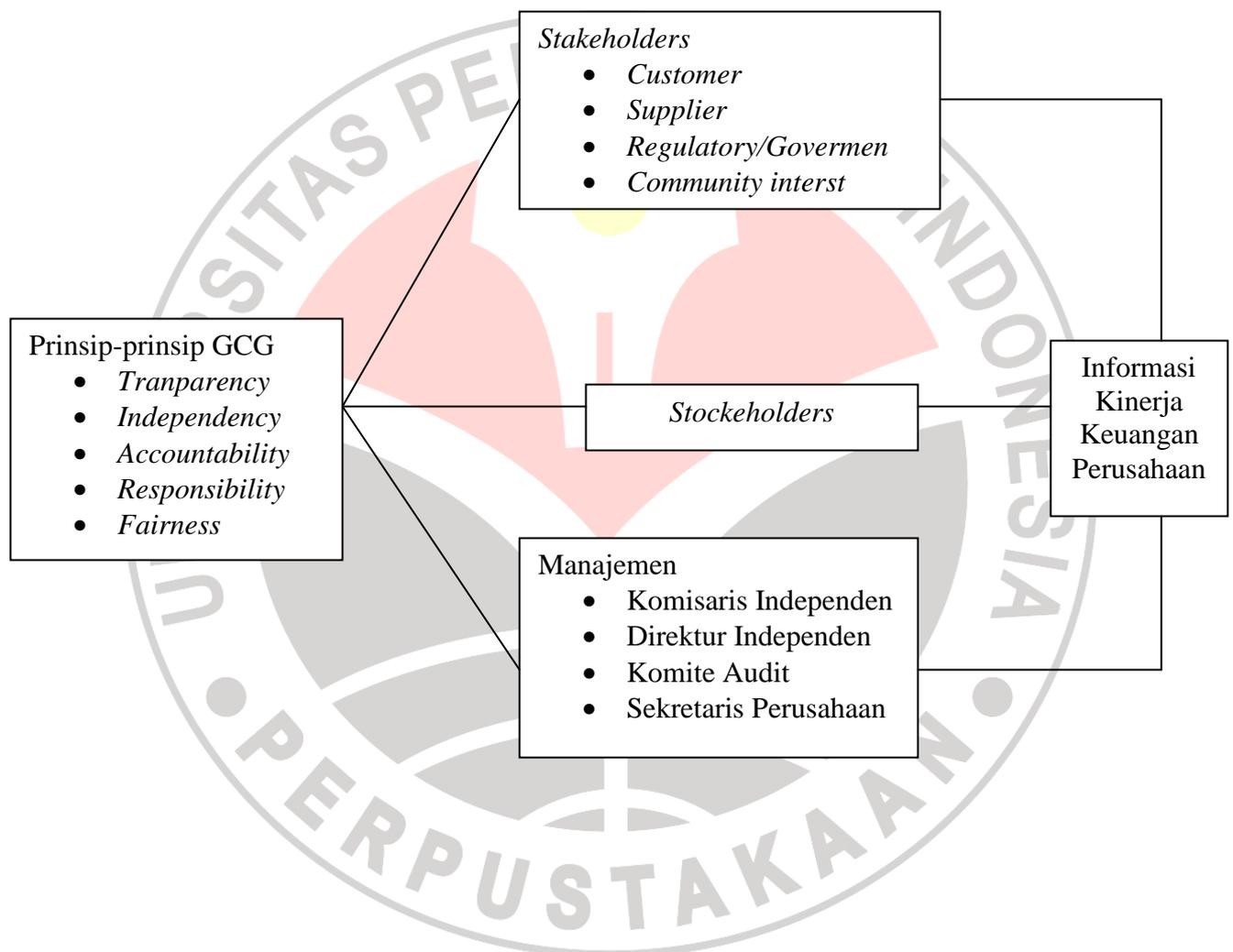
Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Atau dengan kata lain pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kinerja pengelolaan perusahaan yang harus mengakui hak publik, sebagaimana diakui dalam hukum serta diharapkan dapat mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan publik dalam menciptakan kemakmuran, kesepakatan kerja dan pendukung perusahaan yang bersifat finansial.

- **Kewajaran (*Fairness*)**

Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap informasi kinerja keuangan suatu perusahaan.

Untuk lebih jelasnya lagi kita lihat gambar kerangka pemikiran



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka paradigma berfikirnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2

Paradigma Pemikiran

Artinya penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Informasi kinerja keuangan perusahaan.

1.5.2 Asumsi

Asumsi adalah sesuatu yang dianggap tidak berpengaruh/konstan. Asumsi merupakan faktor-faktor yang diawasi. Asumsi dapat berhubungan dengan syarat-syarat kondisi dan tujuan. Asumsi memberikan hakikat, bentuk, dan arah argumentasi. (Suharsini Arikunto, 2002:58)

Sedangkan menurut Hoy & Miskei (dalam Sugiyono, 2003:56) ” Asumsi adalah pernyataan yang diterima kebenarannya tanpa pembuktian”.

Berdasarkan pengertian asumsi diatas, maka penulis merumuskan asumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan manajemen dalam melakukan *feed back* sistem dianggap konstan.
2. Hal-hal lain seperti situasi dan kondisi perusahaan dianggap konstan.

3. Hal-hal lain seperti situasi dan kondisi perekonomian dianggap konstan.

1.5.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2006: 70)

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dalam anggapan dasar, maka penulis merumuskan hipotesis yaitu “penerapan prinsip *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap informasi kinerja keuangan suatu perusahaan”.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti maka, penulis berharap dapat melakukan penelitian pada suatu:

Nama perusahaan : PT.POS Indonesia
Alamat : JL. Cilaki No.159
Waktu : Penelitian ini akan dilakukan selama 2 (dua) bulan
dari mulai bulan mei-juli 2007.